

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

DPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit Halaman : 11

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabengan

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Targetkan Gumas Kembali Raih Opini WTP di 2024

KUALA KURUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama sembilan kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Kami menerima opini WTP pertama kali di tahun 2012 lalu. Kemudian, tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023," ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gumus Hardeman, Selasa (4/6).

Dijelaskannya, opini WTP yang diberikan BPK RI atas LKPD merupakan pernyataan yang profesional terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemkab.

"Opini WTP yang diberikan itu membuktikan bahwa penyelenggaraan dari tata kelola keuangan dan pemerintahan yang dilakukan selama ini, sudah sesuai regulasi yang ada," terangnya.

Hardeman mengakui, raihan opini WTP sebanyak sembilan kali tersebut, tidak lantas membuat semua berpuas diri. Melainkan bagaimana hal itu menjadi motivasi untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika, kredibilitas, akuntabilitas, komitmen, efektif dan efisien.

Pihaknya pun mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang selama ini sudah melaksanakan tata kelola keuangan sesuai peraturan yang ada. Ini merupakan hasil kerja sama dari seluruh perangkat daerah.

"Dengan kualitas pengelolaan keuangan yang semakin baik, APBD akan terus meningkat dan digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," tegas Hardeman.

Meskipun meraih predikat

opini WTP sebanyak sembilan kali tambah dia, Pemkab Gumus juga pernah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015.

"Kami berharap bisa mendapatkan kembali opini WTP untuk LKPD tahun 2024, melalui tata kelola keuangan yang baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandasnya. (arm/gus)